

**Analisis Pusat Pertumbuhan dan  
Pemerataan Terhadap Rencana  
Pembentukan Provinsi Papua Selatan**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:  
Gina Renatha  
2016110011**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN  
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT  
No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
BANDUNG  
2020**

**Analysis of Growth Center and Equality Towards  
The Establishment Plan for Province of South  
Papua**



**UNDERGRADUATE THESIS**

**Submitted to complete part of the requirements for  
Bachelor Degree in Economics**

**By  
Gina Renatha  
2016110011**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS  
Accredited by National Accreditation Agency  
No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
BANDUNG  
2020**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



## PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Pusat Perumbuhan dan Pemerataan  
Terhadap Rencana Pembentukan Provinsi  
Papua Selatan**

Oleh:

Gina Renatha

2016110011

Bandung, 27 Juli 2020

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivantia Savitri Mokoginta, Ph.D

Pembimbing Skripsi,

M. Ishak Somantri, Drs., MSP

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Gina Renatha  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 April 1998  
NPM : 201611001  
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan  
Jenis naskah : Skripsi

## JUDUL

Analisis Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Terhadap Rencana Pembentuka

Provinsi Papua Selatan

Pembimbing : M. Ishak Somantri, Drs., MSP.

## MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.  
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: 2020-09-07

Pembuat pernyataan:



Gina Renatha

## ABSTRAK

Undang Undang Dasar Negara menyatakan tanah Papua seharusnya memiliki empat provinsi namun hingga saat hanya memiliki dua provinsi. Pada tahun 2018 pemerintah Indonesia berencana melakukan pemekaran wilayah di Provinsi Papua dengan membentuk provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan. Dalam jangka panjang Provinsi Papua Selatan perlu mengetahui kabupaten mana yang paling tepat untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan dan apakah daerah pusat pertumbuhan dapat membantu pemerataan wilayah di Provinsi Papua Selatan. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Skalogram, dan Indeks Sentralisasi Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan dengan kelengkapan fasilitas tertinggi dan nilai indeks sentralisasi tertinggi. Namun, jika diaplikasikan dalam *central place theory*, Kabupaten Boven Digoel lebih menguntungkan dalam segi letak geografis jika dijadikan sebagai pusat pertumbuhan.

**Kata Kunci :** *Pemekaran Wilayah, Pusat Pertumbuhan, central palace theory*

## **ABSTRACT**

*The State Constitution claims that Papua has four provinces, but to date only have two provinces. In 2018 the Indonesian government plans to expand the territory in Papua Province by forming a new province, South Papua Province. In the long term, the Province of South Papua needs to know which district is most appropriate to be used as a growth center and whether the central region can help to distribute the area equally in South Papua Province. The results of the study used a Scalogram, and the Centralization Index resulted the Merauke Regency being a district that could be used as a growth center with the highest completeness of facilities and the highest centralization index value. However, if applied in central place theory, Boven Digoel Regency is more advantageous in terms of geographical location if it is used as a center of growth.*

**Keywords:** *Expansion Area, Growth Center, central palace theory*

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Skripsi yang ditulis dengan judul “Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Aplikasi *Central Palace Theory* di Provinsi Papua Selatan” diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis juga menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini sehingga diperlukan kritik dan saran yang membangun yang berguna untuk penelitian di masa yang akan mendatang.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali tantangan dan hambatan yang dihadapi dari masa persiapan penulisan skripsi hingga proses penulisan skripsi ini selesai. Namun banyaknya pihak yang memotivasi dan memberi dukungan yang di dapat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Firjadi Putra dan Ibu Sri Supiati terimakasih buat segala dukungannya baik secara materil maupun non-materil. Selain itu, saya juga mengucapkan terimakasih kepada kakak dan kembaran saya terimakasih untuk segala supportnya.
2. Bapak M. Ishak Somantri, Drs., MSP, selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Terimakasih juga kepada Ibu Januarita Hendrani, Dra., M.A., Ph.D. selaku dosen wali yang telah memberikan semangat, kepercayaan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun saat penulis menyelesaikan skripsi ini sehingga semua dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Kepada Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi ekonomi pembangunan.

4. Kepada Ibu Masniaritta Pohan, Ph.D., Ibu Siwi Nugraheni, M.Env., Ibu Noknik K. H., Pak Martinus Yuwana, Pak Charvin Lim, M.Sc., Pak Dr Fransiscus Haryanto. Selaku dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya selama berkuliah di ekonomi pembangunan.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Bila, Rere, Rina, Alya, Feren, Nadia Restu, dan Venny. Terimakasih atas segala cerita, canda, tangis, tawa yang membuat masa perkuliahan menjadi lebih indah dan penuh warna.
6. Kepada sahabat-sahabat saya semasa SD hingga SMA yaitu Ami, Asta, Bila, Chica yang selalu memberikan motivasi untuk bisa lulus dan sukses bersama meskipun kita semua beda-beda daerah kuliahnya.
7. Kepada teman temen seperjuangan EKL yaitu Bang Kev, Joseph, Fachmi. Terimakasih sudah menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran selama di kajian EKL.
8. Kepada teman dan keluarga EP 2016 lainnya yaitu Nadia Giovanno, Disma, Dinda, Ferinda, Nia, Zahra, Ita, Debora, Difa, Rio Eva, Sisi. Terimakasih atas segala canda tawanya selama masa perkuliahan.
9. Berbagai pihak yang telah mendukung selama masa perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Bandung, 08 Juli 2020

Gina Renatha

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>I</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>V</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	4
1.3 TUJUAN .....	5
1.4 KERANGKA PEMIKIRAN.....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
2.1 LANDASAN TEORI .....	7
2.1.1 <i>Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Pole)</i> .....	7
2.1.2 <i>Central Palace Theory</i> .....	9
2.2 PENELITIAN TERDAHULU .....	11
2.3 LANDASAN YURIDIS .....	13
2.4 BERBAGAI METODE .....	14
<b>BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN</b> ....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
3.1 METODE PENELITIAN .....	17
3.1.1 <i>Analisis Skalogram</i> .....	17
3.1.2 <i>Analisis Indeks Sentralisasi</i> .....	19
3.2 OBJEK PENELITIAN .....	20
3.3 DATA PENELITIAN .....	22
<i>Jumlah Fasilitas yang Tersedia</i> .....	22
· Fasilitas Pendidikan .....	22
· Fasilitas Kesehatan .....	23
· Fasilitas Peribadatan.....	24
· Fasilitas Ekonomi .....	24
3.4 VARIABEL YANG DITELITI.....	25

<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
4.1 HASIL PENGOLAHAN DATA .....	28
4.1.1 Hasil Analisis Indeks Sentralisasi.....	28
4.1.2 HASIL ANALISIS INDEKS SENTRALISASI .....	33
4.1.3 Aplikasi <i>Central Palace Theory</i> .....	36
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
5.1 KESIMPULAN .....	41
5.2 SARAN .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>A</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>H</b>

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : KERANGKA PEMIKIRAN IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN APLIKASI <i>CENTRAL PALACE THEORY</i> DI PROVINSI PAPUA SELATAN.....	6
GAMBAR 2 : SISTEM PEKOTAAN.....	10
GAMBAR 3 : PETA KABUPATEN PROVINSI PAPUA SELATAN.....	21
GAMBAR 4 : HIERARKI PROVINSI PAPUA SELATAN.....	37

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 : DATA PEMEKARAN PROVINSI ERA REFORMASI.....	2
TABEL 2 : DATA FASILITAS PENDIDIKAN .....	23
TABEL 3 : DATA FASILITAS KESEHATAN.....	23
TABEL 4 : DATA FASILITAS PERIBADATAN .....	24
TABEL 5 : DATA FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA .....	25
TABEL 6 : VARIABEL DAN SUMBER DATA.....	25
TABEL 7 : HASIL ANALISIS SKALOGRAM BERDASARKAN JUMLAH FASILITAS DI KABUPATEN PROVINSI PAPUA SELATAN.....	31
TABEL 8 : RANGKUMAN HASIL ANALISIS SKALOGRAM BERDASARKAN JUMLAH FASILITAS DI KABUPATEN PROVINSI PAPUA SELATAN .....	32
TABEL 9 : JUMLAH FASILITAS DAN UNIT FASILITAS YANG DIMILIKI .....	33
TABEL 10 : NILAI INDEKS SENTRALISASI SETIAP KABUPATEN .....	34

## **Bab 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berlakunya undang undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemberian otonomi luas kepada daerah juga memberikan peluang untuk setiap daerah melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah merupakan terbentuknya daerah administratif baru baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota atau kabupaten. Alasan mengapa pemekaran daerah menjadi pendekatan yang dipilih dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah oleh pemerintah daerah ataupun pusat yaitu karena pendekatan ini lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meminimalisir kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan (ali, Mawar, & Syah, 2018). Dengan begitu, adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat memberikan dampak untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah serta dapat membantu menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah (Muta'ali L. , 2011)

Di indonesia sendiri sampai dengan tahun 2008 sudah terdapat 183 daerah pemekaran yang terdiri dari 151 kabupaten dan 32 kota (Herawati, 2008). Selain itu, hingga tahun 2008 Negara Indonesia memiliki 484 daerah Kabupaten/kota yang terdiri dari 388 kabupaten dan 32 kota. Selain itu, dari era reformasi hingga saat ini Negara Indonesia telah membentuk 8 provinsi baru. Pembentukan provinsi-provinsi baru tersebut juga di dorong oleh kebijakan otonomi daerah yang berlaku di Negara Indonesia. Tabel dibawah ini menunjukkan provinsi yang pernah melakukan pemekaran di era reformasi.

**Tabel 1 :****Data Pemekaran Provinsi Era Reformasi**

Tahun	Daerah Induk	Daerah Pemekaran
4 Oktober 1999	Provinsi Papua	Provinsi Irian Jaya Barat (Provinsi ke-27)
4 Oktober 1999	Provinsi Maluku	Provinsi Maluku Utara (Provinsi ke-28)
17 Oktober 2000	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Banten (Provinsi ke-29)
4 Desember 2000	Provinsi Sumatera Selatan	Kepulauan Bangka Belitung (Provinsi ke 30)
22 Desember 2000	Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Gorontalo (Provinsi ke-31)
25 Oktober 2002	Provinsi Riau	Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi ke-32)
5 Oktober 2004	Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Barat (Provinsi ke-33)
25 Oktober 2012	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Utara (Provinsi ke-34)

Pemekaran daerah biasanya dipicu oleh faktor perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya, ketimpangan pembangunan antar daerah, dan luas daerah (Prof. Sjafrizal, 2008). Luas daerah dapat menjadi pemicu pemekaran karena wilayah yang terlalu luas akan berdampak pada pelayanan publik tidak efisien ke seluruh pelosok daerah. Selain itu, tujuan dilakukannya pemekaran daerah menurut PP nomor 129 tahun 2000 yang pertama untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, kedua pengelolaan potensi daerah dan ketiga mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam jangka panjang daerah-daerah yang melakukan pemekaran perlu mengetahui wilayah mana yang paling tepat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Hal tersebut dikarenakan, daerah pusat pertumbuhan dapat dijadikan salah satu cara untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Gulo, 2015). Selain itu, penciptaan pusat pertumbuhan akan diikuti oleh *down effect* (dampak penyesuaian ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran), sehingga kegiatan pusat pertumbuhan akan memberikan dampak pada daerah sekitarnya (Imelda, 2013). Dengan begitu, diharapkan daerah pusat pertumbuhan dapat mendorong proses pembangunan di wilayah sekitarnya (Prof. Sjafrizal, 2008).

Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan pemekaran Provinsi Papua dengan membentuk provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan. Rencana ini masih merupakan usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Provinsi Papua Selatan rencananya hanya akan mengambil empat kabupaten dari Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi. Namun, Kabupaten Pegunungan Bintang juga akan dipertimbangkan untuk ikut menjadi bagian Provinsi Papua selatan. Hal itu tersebut dikarenakan, gabungannya Kabupaten Pegunungan Bintang dapat menjadi salah satu solusi percepatan pembangunan di Papua. Akses Kabupaten Pegunungan Bintang ke bagian selatan lebih mudah karena terdapat trans Papua menuju Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke dibandingkan jika harus tetap berada di Provinsi Papua yang masih mengutamakan akses udara. Pemekaran wilayah di daerah Papua tersebut didasari oleh aspirasi tokoh-tokoh Papua karena seringkali terjadi konflik di beberapa daerah Indonesia Timur. Rencana pemekaran ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) bahwa tanah Papua seharusnya memiliki empat provinsi, namun hingga saat ini baru ada dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Beritagar, 2019). Selain itu, rencana pemekaran wilayah juga didukung oleh pemerintah pusat karena dari aspek ekonomi hal tersebut dapat mendorong pemerataan antar daerah khususnya dari segi infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (CNN Indonesia, 2019).

Dalam jangka panjang, Provinsi Papua selatan yang merupakan provinsi baru di Papua harus memiliki daerah yang tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan, yang mendorong pemerataan dan pembangunan di masing masing wilayah. Adanya calon kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan diharapkan dapat membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan. Suatu daerah yang akan dijadikan pusat pertumbuhan perlu memiliki karakteristik yakni (1) Terdapat berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, (2) adanya efek pengganda (*multiplier effect*), (3) adanya konsentrasi geografis, (4) dan dapat mendorong daerah belakang agar terciptanya pemerataan daerah (Pandjiputri, 2013). Hingga saat ini, bupati dari setiap kabupaten mencalonkan Kabupaten Merauke sebagai calon ibu kota dari Provinsi Papua Selatan dengan alasan karena Kabupaten Merauke memiliki sejarah pemekaran dengan kabupaten sekitarnya (Kumparan, 2019).

Dengan begitu, penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut apakah kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan di Provinsi Papua Selatan, berdasarkan ketersediaan fasilitas yang dimiliki dan nilai

sentralisasi yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan tersebut dapat mendukung pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah (*spread effect*) di Provinsi Papua Selatan dengan menggunakan konsep *central palace theory*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rencana pembentukan provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan didorong karena banyaknya konflik di beberapa daerah. Selain itu, pembentukan provinsi baru dilakukan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar daerah khususnya di infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah terpencil. Dengan begitu, agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai diperlukan strategi dalam pembangunan salah satunya menentukan daerah yang paling tepat menjadi pusat pertumbuhan di provinsi baru. Hal tersebut dikarenakan, pendirian pusat pertumbuhan dapat memberikan *down effect* dan *spread effect* terhadap daerah di sekitarnya (Imelda, 2013). Daerah pusat pertumbuhan diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Selatan. Hingga saat ini, Kabupaten Merauke direncanakan akan menjadi ibu kota di Provinsi Papua Selatan. Kabupaten yang akan dijadikan pusat pertumbuhan perlu melihat lokasi, dan aksesibilitas yang tersedia agar pemerataan daerah terwujud dan perekonomian Provinsi Papua Selatan dapat bergerak secara mandiri. Dengan begitu, perlu bagi pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan nantinya untuk mengetahui daerah mana yang paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, serta keuntungan lokasi yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan di Provinsi Papua Selatan berdasarkan banyaknya fasilitas yang tersedia?
2. Apakah kabupaten yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dapat mendukung pemerataan pertumbuhan antar wilayah di Provinsi Papua Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan daerah yang paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan pada calon Provinsi Papua Selatan. Penentuan pusat pertumbuhan dilihat berdasarkan banyaknya jumlah fasilitas yang tersedia baik dari fasilitas ekonomi, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut apakah daerah yang dijadikan pusat pertumbuhan dapat mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah yang akan diaplikasikan ke dalam *central place theory*. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dalam membangun provinsi baru di Papua khususnya untuk mencapai pemerataan pertumbuhan antar wilayah.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan pemekaran Provinsi Papua dengan membentuk provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan. Pemekaran wilayah di Provinsi Papua dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pemerataan antar daerah khususnya di sisi infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah terpencil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (CNN Indonesia, 2019). Meskipun rencana pemekaran ini masih merupakan bentuk kajian dari Kementerian PUPR namun, dalam jangka panjang Provinsi Papua Selatan harus bisa berkembang dan memiliki perekonomian yang dapat tumbuh secara mandiri. Dengan begitu Provinsi Papua Selatan perlu memiliki tata rancang wilayah yang baik salah satunya dengan menetapkan daerah pusat pertumbuhan yang paling tepat. Pengambilan keputusan tentang dimana sebaiknya pusat kegiatan ekonomi tersebut berlokasi merupakan keputusan investasi yang sangat penting (Friedmann dan Alonso, 1964). Selain itu, penciptaan pusat pertumbuhan yang tepat akan diikuti oleh down effect (dampak peneteskan ke bawah) dan spread effect (dampak penyebaran), sehingga kegiatan pusat pertumbuhan akan berdampak pada daerah sekitarnya (Imelda, 2013). Dalam penelitian ini yang akan menjadi perhatian penelitian adalah melihat lebih lanjut apakah Kabupaten Merauke yang telah ditetapkan sebagai calon ibu kota oleh gubernur dari setiap kabupaten merupakan daerah yang paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis Skalogram dan analisis Indeks Sentralisasi untuk mencari daerah yang paling tepat sebagai pusat pertumbuhan. Variabel yang akan digunakan dalam metode Skalogram dan Indeks Sentralisasi yaitu jenis dan jumlah

fasilitas yang tersedia dengan data tahun yang beragam yakni 2017-2019 di lima kabupaten yang akan menjadi bagian Provinsi Papua Selatan.

Setelah mengetahui letak kabupaten yang paling tepat menjadi pusat pertumbuhan Provinsi Papua Selatan, hal lain yang menjadi perhatian penelitian yakni apakah daerah pusat pertumbuhan tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Dalam mengidentifikasi hal tersebut, peneliti menggunakan konsep *central place theory* yang akan diperlihatkan dalam bentuk peta. Dengan begitu, hasil penelitian ini berupa kabupaten yang paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan dan mengetahui apakah kabupaten tersebut dapat memberikan *spread effect* dan *down effect* untuk mendorong pemerataan wilayah sesuai dengan tujuan dilakukannya pemekaran wilayah di Provinsi Papua.

GAMBAR 1.1

KERANGKA PEMIKIRAN IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN APLIKASI *CENTRAL PALACE THEORY* DI PROVINSI PAPUA SELATAN

